

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah melakukan reformasi di bidang pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) dan UU No. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004). Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat Otonom dan menerapkan Asas Desentralisasi.

Otonomi Daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor nonkeuangan. Asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah menurut UU No. 22 Tahun 1999 mencakup paling tidak 3 hal yaitu :

1. **Memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Keleluasan Otonomi ini mencakup kewenangan dalam penyelenggaraan (pengelolaan) pemerintah termasuk dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, *control*, dan evaluasi.**
2. **Otonomi yang nyata, berarti bahwa daerah leluasa dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada, dibutuhkan, tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.**
3. **Otonomi yang bertanggung jawab, berarti sebagai konsekuensi logis dari pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam pemberian pelayanan kepada publik dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat di daerahnya.¹**

Otonomi untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas yaitu :

- a. Kewenangan lintas kabupaten/kota;
- b. Kewenangan yang belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota;

¹ Republik Indonesia, UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah.

c. Kewenangan lainnya menurut PP No. 25 Tahun 2000.

Sejak era reformasi Pemerintah Indonesia telah menetapkan Otonomi Daerah yang merupakan aspek Desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat

Salah satunya adalah tentang anggaran pembelanjaan daerah yang menjadi kewenangan dari pemda terbagi atas dua dana yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan sumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah. “Untuk mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan daerah, upaya mutlak yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparat pemerintahan daerah serta organisasi *civil society* dalam interaksi demokratis serta proses pembangunan secara komprehensif”.²

Pada kenyataannya, Dana Alokasi Umum masih menjadi primadona dibandingkan dengan pembiayaan daerah karena PAD dan pinjaman belum dapat diandalkan. Padahal seharusnya PAD yang digunakan untuk membangun daerah agar banyak untuk investasi pada daerah tersebut, sehingga pendapatan daerahnya dapat digunakan untuk membiayai pembelanjaan daerah. Pembelanjaan daerah tinggi menjadi dua yaitu pembelanjaan operasional serta pembelanjaan modal. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana karena masih menggantungkan dengan adanya dan dari pemerintah pusat. “Karena beragamnya daerah otonom di Indonesia, dibutuhkan adanya system yang mengatur agar ketimpangan daerah tidak semakin lebar dan daerah yang kaya membantu daerah yang miskin.”³

²Indra Bastian, **Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Jakarta : Salemba Empat, 2006, hal. 18.

³Mudrajad Kundoro, **Otonomi dan Pembangunan Daerah**, Jakarta : Erlangga, 2004, hal 23.

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan sebagai pemertaan atau mengisi *fiscal gap* (Kesenjangan Fiskal). Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan Dana Alokasi Khusus dipakai untuk menutupi kesenjangan pelayanan public antar daerah dengan prioritas pada bidang kegiatan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan, dan perikanan dan pertanian, prasarana dan pemda. Permasalahan yang timbul adalah anggaran pengeluaran daerah yang mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.

Perubahan berbagai kebijakan nasional sebagaimana dimaksud membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi masing masing sebagai sumber pendapatan daerah, seperti PAD. Namun pada kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara, yang masih menggantungkan urusan rumah tangganya dari keuangan Pusat yang disalurkan kepada daerah yang dikenal dengan Dana Alokasi Umum (DAU). Hal tersebut dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa dari tahun ketahun besarnya dana alokasi umum yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Pembangunan pada Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sehubungan dengan Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran belanja pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Bagi pemerintah daerah memberikan dalam hal penyusunan kebijakan dimasa yang akan datang, dalam hal pengalokasian anggaran belanja pembanguna yang terdapat di APBD.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian dan unsur-unsur APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. “Sedangkan menurut Saragih APBD adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun.”⁴

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Selanjutnya dikatakan bahwa Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD membuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standard pelayanan yang diharapkan dan diperkirakan biaya atau suatu komponen kegiatan yang bersangkutan, serta

⁴Juli Panglima Saragih, **Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi**, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hal.122.

bagian pendapatan APBD yang digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum, belanja administrasi dan pemeliharaan dan belanja modal/investasi.

b. Struktur APBD

Struktur APBD yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri 13/2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Oleh karena penelitian ini menggunakan laporan APBD yang memakai format Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002, maka APBD yang berdasarkan format tersebut terdiri atas tiga bagian yaitu: “Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan”.

2.1.2 Dana Alokasi Umum

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemertaan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.⁵ Sumber penerimaan daerah dalam konteks Otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih sangat didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi hasil (DBH), sedangkan porsi PAD masih relatif kecil

Mengacu PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan bahwa tujuan DAU terutama adalah untuk: (a) *Horinzontal equity* dan (b) *Sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara

⁵Republik Indonesia, 2004. **Undang undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah.**

adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah kecukupan (*sufficiency*), terutama adalah untuk menutup *fiscal gap*. *Sufficiency* dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kewenangan, beban, dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Pada dasarnya terdapat dua jenis grant yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu: (1) *Block grant* (Dana Alokasi Umum), dan (2) *specific grant* (Dana Alokasi Khusus). Dalam rangka meningkatkan *local discretion grant*, yang diberikan oleh pemerintah pusat lebih banyak bersifat *block grant*, bukan *specific grant*. Sebagaimana dijelaskan oleh Skretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah (2001) bahwa perhitungan DAU didasarkan pada dua faktor, yaitu: (1) Faktor murni, dan (2) Faktor penyeimbang. Faktor murni adalah perhitungan DAU berdasarkan formula. Faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah. Dimasukkannya faktor penyeimbang dalam perhitungan DAU adalah karena adanya kelemahan dalam faktor murni. Perhitungan DAU dengan menggunakan formula murni menunjukkan bahwa banyak daerah yang mengalami penurunan penerimaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara beberapa daerah mengalami lonjakan penerimaan yang luar biasa.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun formula DAU bagi Provinsi, kabupaten atau kota menurut UU Nomor 25/1999 dalam Saragih adalah sebagai berikut:

$$\text{“Jumlah DAU (provinsi A) } = \frac{\text{BobotProvinsiA}}{\text{Jumlahbobotseturuhprovinsi}}$$

$$\text{Jumlah DAU (Kabupaten/Kota A)} = \frac{\text{Bobot Kabupaten/Kota A}}{\text{Jumlah bobot seluruh Kabupaten/Kota A}} \text{,}^6$$

Sedangkan menurut PP No. 53 Tahun 2009 tentang *Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010* bahwa Dana Alokasi Umum adalah Dana Alokasi Umum Murni sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010⁷. Proporsi Dana Alokasi Umum untuk Daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan sebagaimana berikut:

- a. Untuk daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum.
- b. Untuk daerah Kabupaten dan Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah* bahwa “kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah”⁸.

Penggunaan Dana Alokasi Umum untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Dibeberapa daerah sebagian besar DAU digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan sisanya digunakan untuk belanja lainnya seperti belanja modal. Pada dasarnya tidak terdapat batasan dalam penggunaan DAU sehingga daerah dapat leluasa dalam mengalokasikan dana tersebut sesuai kebutuhan. Yang menjadi permasalahan apabila DAU tidak dikelola dengan efektif dan efisien. Pemanfaatan DAU yang dominan terhadap belanja pegawai berdampak pada berkurangnya alokasi DAU pada Belanja

⁶Juli Panglima Saragih, **Op. Cit**, hal. 98.

⁷Republik Indonesia, **PP No. 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2010**

⁸ Republik Indonesia, **UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.**

Modal, ataupun berkurangnya alokasi dana untuk kegiatan yang berdampak langsung pada penyediaan layanan masyarakat seperti program penanggulangan kemiskinan, program pemberdayaan masyarakat dan sebagainya.

2.1.3 Belanja Daerah

UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan belanja daerah adalah seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih daerah dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. Organisasi, disesuaikan dengan susunan organisasi yang ada di dalam pemerintah daerah.
2. Fungsi, berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan pengelolaan keuangan negara.
3. Program dan kegiatan, disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Jenis belanja, terdiri dari Belanja Operasi, Modal, Tidak terduga, dan Transfer.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang mengurangi kekayaan daerah untuk membiayai operasional pemerintah, dimana pengeluaran tersebut tidak akan diperoleh kembali karena aktivitas operasional pemerintah daerah yang dilakukan tidak menghasilkan laba sebagaimana aktivitas operasional suatu perusahaan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tinjauan penelitian terdahulu

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil pPenelitian
Irma Syafitri	Pengaruh	Variabel dependen:	Secara parsial ghanya

(2009)	<p>pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatra utara.</p>	<p>belanja modal pemerintah daerah. Variabel independen : pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU).</p>	<p>pendapatan asli daerah (PAD) yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap anggaran belanja modal. Dan secara simultan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD), dan dana alokasi umum (DAU) mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal.</p>
<p>Dyah Arsita Sari (2013)</p>	<p>Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU), dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di kabupaten Bayolali.</p>	<p>Variabel dependen: belanja daerah variabel independen : dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD).</p>	<p>Secara parsial hanya pendapatan asli daerah (PAD) yang mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten Bayolali. Dan secara simultan, bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah (PAD) memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten Bayolali.</p>
<p>William Gani dan Septian Bayu Kristanto (2013)</p>	<p>Pengaruh dana alokasi umum dan khusus terhadap belanja daerah</p>	<p>Variabel dependen: belanja daerah variabel independen : dana alokasi umum, dan</p>	<p>Secara parsial dana alokasi umum dan dan dana alokasi khusus sama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap</p>

	kabupaten/ kota di pulau sumatra.	dana alokasi khusus.	belanja daerah. Dan juga secara simultan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
--	---	-------------------------	--

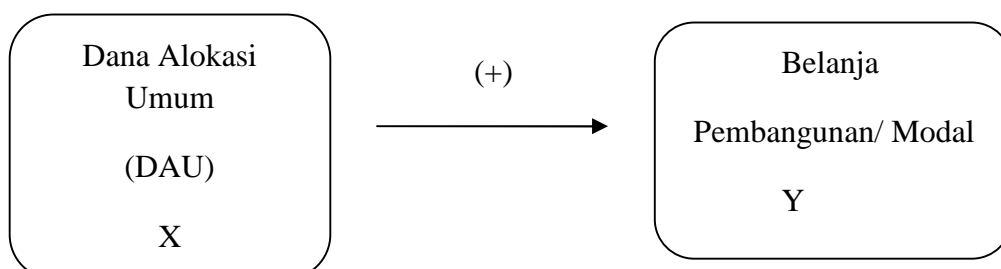
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis

2.3.1 Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan suatu kajian yang berangkat dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang mendahuluinya. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dan merupakan output pengalokasian sumber daya. Keterbatasan sumber daya adalah pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran daerah. Hal ini dapat diatasi dengan menciptakan manajemen pelayanan publik yang terencana dengan baik.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja pembangunan dalam APBD untuk menambah aset tetap. alokasi belanja pembangunan ini di dasarkan pada kebutuhan daerah atas dasar sarana dan prasarana baik untuk kelancara pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk kualitas pelayan publik. Besarnya belanja atas modal yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD tentu sangat dipengaruhi oleh posisi keuangan pada daerah tersebut. Posisi keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besarnya dana alokasi umum pada daerah tersebut.

Untuk menyederhanakan alur pemikiran tersebut maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat diambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3.2 Hipotesis Penelitian

Hasan mengatakan bahwa hipotesis adalah “pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris”.⁹Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pembangunan daerah pada pemerintah di Sumatera Utara.

⁹Iqbal Hasan, **Analisis Data Penelitian Dengan Statistik**, Cetakan Pertama, Jakarta Bumi Aksara, 2004, hal . 31.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota yang berotonomi diatas tahun 2003. Alasannya adalah agar dapat melihat seberapa besar kemampuan daerah yang baru berotonomi memenuhi kebutuhan belanja daerahnya sendiri.

3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisi yang terdiri atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota yang sudah berotonom mulai dari tahun 2003-2010 dengan tahun penelitian 2009-2015, yaitu sebanyak 12 kabupaten dari 1 kota.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan *puposive sampling*, yaitu tehnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Beberapa pertimbangan yang ditentukan peneliti dalam pengambilan sampel adalah:

- a. Data realisasi dana alokasi umum (DAU) dari laporan realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Utara periode 2009-2014
- b. Laporan realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatra Utara.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Penelitian ini menggunakan *pooled data*, yaitu kombinasi antara data time series dan data cross section selama periode 2009-2014 data penelitian ini berupa realisasi DAU dan belanja pembangunan/modal dari laporan realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatra Utara tahun 2009-2014 yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (www.djpk.depkeu.go.id). Sedangkan kabupaten/kota yang menjadi daerah penelitian ini adalah dapat dijelaskan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Daftar Kabupaten/kota dan Tahun Pemekaran

Kabupaten/kota	Tahun Pemekaran
Samosir	2003
Serdang Bedagai	2003
Batubara	2007
Labuhan Batu Utara	2008
Humbang Hasundutan	2003
Nias Barat	2008
Nias Selatan	2003
Nias Utara	2008
Padang Lawas Utara	2007
Pakpak Bharat	2003
Gunung Sitoli	2008
Padang Lawas	2007
Labuhan Batu Selatan	2008

3.4 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitiannya adalah dana alokasi umum (DAU). Variabel terikatnya adalah belanja pembangunan/modal. Defenisi operasional dan pengukuran variabel dapat dilihat dari Tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Pengukuran	Skala
Independen Variabel			
Dana Alokasi Umum (DAU)	DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004)	Dana alokasi umum (DAU) dapat dilihat dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pendapatan.	Rasio
Dependen Variabel			
Belanja Daerah	UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan belanja daerah adalah seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah dalam periode anggaran yang bersangkutan.	Besarnya belanja pembangunan daerah dapat dilihat dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada bagian belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik.	Rasio

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan mendownload situs www.djpk.depkeu.go.id. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.6 Metode Analisis Data Panel

Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program SPSS. Analisis dengan menggunakan Panel Data adalah kombinasi antara lintas waktu (*time-series data*) dan lintas individu (*cross-section data*). Untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari suatu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama di survey dalam beberapa waktu. Dalam model data panel, persamaan model dengan menggunakan data lintas individu.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + e_t ; i = 1, 2, \dots, n$$

Dimana n adalah banyaknya data *cross-section* sedangkan persamaan model dengan *lintas waktu* adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_n + e_n ; t = 1, 2, \dots, n$$

Dimana t adalah banyaknya *data time-series* mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis dengan:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + e_{it}$$

$i = 1, 2, \dots, n ; t = 1, 2, \dots, t$

N = banyaknya data

T = banyaknya waktu

$n \times t$ = banyaknya data panel

Keunggulan penggunaan data panel dibandingkan deret waktu dan kerat lintang adalah :

- a. Dapat memberikan peneliti jumlah penggunaan yang besar, meningkatkan *degrees of freedom* (derajat kebebasan), dan memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolineritas antara variabel penjelas, dimana dapat menghasilkan ekonometri yang efisien.
- b. Dengan data panel, data lebih informatif, lebih bervariasi yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* atau *time series* saja
- c. Data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.
- d. Dalam analisis model data panel dikenal dua macam pendekatan, yang terdiri dari efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Kedua pendekatan yang dilakukan dalam analisis data panel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendekatan efek tetap (*fixed effect*)

Salah satu kesulitan data panel adalah asumsi bahwa intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk menghasilkan hal tersebut, yang dilakukan data panel adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda beda baik lintas unit (*cross section*) maupun antar waktu (*time series*). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebuah model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)*.

2. Pendekatan efek acak (*Random Effect*)

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel boneka ini akan mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degrees of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Secara umum, persamaan modelnya dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{it} + e_{it}$$

Tetapi kita anggap bahwa β_{0i} adalah satu peubah acak dengan nilai rata-ran β_0 . Dan nilai intersep untuk suatu perusahaan individu dapat dinyatakan sebagai :

$$\beta_{0i} = \beta_0 + e_i, \quad i=1,2,\dots,n$$

Dengan e_i dengan suatu nsur galat acak dengan rata-rata 0 dan ragam σ_e^2 . Sehingga persamaannya mejadi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Y_{it} &= \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_i + u_{it} \\ &= \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \omega_{it}, \quad \omega_{it} = \varepsilon_i + u_{it} \end{aligned}$$

Galat ω_{it} terdiri dari 2 komponen, yakni ε_i menyatakan komponen lintas individu, dan u_{it} menyatakan kombinasi komponen lintas waktu dan lintas individu. Model komponen galat (*error component model*) ω_{it} terdiri dua atau lebih komponen galat.

3. Penetapan Model Antara Efek Tetap dan Efek Acak

Menurut Judge dalam Jonni J. Manurung ada empat pertimbangan pokok untuk memilih FEM dan REM, yaitu :

- a. Jika jumlah *time series* (T) besar dan jumlah *cross-section* (N) kecil maka taksiran parameter berbeda kecil, sehingga pilihan didasarkan pada kemudahan perhitungan, yaitu FEM.
- b. Bila N besar dan T kecil penaksiran FEM dan REM menghasilkan perbedaan yang signifikan. Pada REM diketahui bahwa $\beta_{0i} = \beta_0 + e_i$ dimana e_i adalah komponen acak *cross-section*, pada FEM diperlakukan β_0 adalah tetap atau tidak acak. Bila diyakini bahwa individu atau *cross-section* tidak acak maka FEM lebih tepat.
- c. Jika komponen *error* ε_i individu berkorelasi maka penaksir REM adalah bias dan penaksir FEM tidak bias.
- d. Jika N besar dan T kecil serta asumsi REM dipenuhi maka penaksir REM lebih efisien dari penaksir FEM.¹⁰

1. Uji Chow

Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, yaitu antara model efek tetap (*fixed effect model*) dengan model koefisien tetap (*common effect model*).

Statistik uji yang digunakan merupakan uji F, yaitu :

$$F = \frac{(R^2_{\text{new}} - R^2_{\text{old}}) / df}{(1 - R^2_{\text{new}}) / df} = \frac{(R^2_{\text{new}} - R^2_{\text{old}}) / m}{(1 - R^2_{\text{new}}) / n - k}$$

m = banyaknya peubah bebas (regresor yang baru)

k = jumlah parameter dalam model yang baru

n = jumlah pengamatan

¹⁰Jonni J. Manurung, dkk, **Ekonometrika Teori dan Aplikasi**, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2005. Hal 220.

keputusan : jika nilai F berada pada nilai maka terima H_0 yaitu berarti model *FEM* adalah model yang terbaik.

2. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak (*random effect model*) dengan model efek tetap (*fixed effect model*). Uji ini bekerja dengan menguji apakah terdapat hubungan antar alat pada model (galat komposit) dengan satu atau lebih variabel penjelas (independen) dalam model. Hipotesis awalnya adalah tidak terdapat hubungan antar alat model dengan satu atau lebih variabel penjelas. Dalam perhitungan statistik Uji Hausman diperlukan asumsi bahwa banyaknya kategori *cross-section* lebih besar dibandingkan jumlah variabel independen (termasuk konstanta) dalam model. Lebih lanjut, dalam estimasi statistik Uji Hausman diperlukan estimasi variansi *cross-section* yang positif, yang tidak selaludapat dipenuhi oleh model. Apabila kondisi-kondisi ini tidak dipenuhi maka hanyadapat digunakan model *fixed effect*. Secara statistic dapat diuji sebagai berikut :

$$\text{Uji } X_{hit}^2 = (b - \beta)' \text{Var}(b - \beta)^{-1} (b - \beta)$$

Dimana : b : koefisien random effect

β : koefisien fixed effect

keputusan : tolak H_0 jika $X_{hit}^2 > X_{(k,a)}^2$ (k =jumlah koefisien slope) atau $p\text{-value} <$

H_0 yaitu jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka model terbaik yang dipilih adalah FE.

3.7. Estimasi Model

Dalam penelitian ini, pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), dan *dummy* tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013 (D2, D3, D4, D5) terhadap belanja pembanguna daerah digunakan asumsi

FEM yang kedua yaitu koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu. Merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh Judge yang mengatakan bahwa jika “dalam data N besar dan T kecil dan data lintas individu diyakini tidak acak maka model FEM lebih tepat”¹¹. Bentuk model *fixed effect* adalah dengan memasukkan variabel *dummy* untuk menyatakan perbedaan intersep. Ketika variabel *dummy* digunakan untuk mengestimasi *fixed model*, maka persamaan tersebut disebut sebagai *Least Square Dummy Variable (LSDV)*. Model fungsi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Utara yaitu :

Model sederhananya adalah sebagai berikut : $Y_{it} = \beta_0 + X_{it}$

$$Y = f(X, D_2, D_3, D_4, D_5)$$

$$Y = \alpha_0 + \alpha_2 D_{2010} + \alpha_3 D_{2011} + \alpha_4 D_{2012} + \alpha_5 D_{2013} + \beta X_{it} + \epsilon_{it}$$

Sedangkan jika dilihat dari data lintas individu :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \alpha_4 D_{4i} + \alpha_5 D_{5i} + \alpha_6 D_{6i} + \alpha_7 D_{7i} + \alpha_8 D_{8i} + \alpha_9 D_{9i} + \alpha_{10} D_{10i} + \alpha_{11} D_{11i} + \alpha_{12} D_{12i} + \alpha_{13} D_{13i} + \beta X_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana :

Y = Belanja Pembangunan

X = Variabel Dana Alokasi Umum (dalam rupiah)

i = unit *cross section*

D = *dummy*

t = unit *time series*

= konstanta

= koefisien

e = galat

benchmark data lintas individu : Nias Selatan

¹¹Loc. Cit.

benchmark data lintas waktu : 2009

3.8. Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

3.8.1. Deteksi Normalitas

Uji kenormalan bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi bahwa galat (residu *res_1*) memiliki sebaran normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa dalam uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai galat mengikuti sebaran normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka uji statistik menjadi tidak sah untuk ukuran sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

a. Analisis Grafik

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat grafik peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari sebaran normal. Sebaran normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan grafik data galat *res_1* akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika sebaran data galat normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Analisis Statistik

Uji statistik yang dapat digunakan menguji kenormalan adalah uji statistika nonparameter, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Data galat menyebar normal , H_1 : Data galat tidak menyebar normal

3.8.2. Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi adalah dimana keadaan variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel yang ada pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Faktor faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien. Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan uji *Breusch-Godfrey Test* atau *Lagrange Multiplier Test (LM)*. Dari hasil uji LM apabila nilai Obs*R-Squared lebih besar dari nilai C^2 tabel dengan *probability* $C^2 < 5\%$ menegaskan bahwa model mengandung masalah autokorelasi. Demikian juga sebaliknya, apabila nilai Obs*R-Squared lebih kecil dari nilai C^2 tabel dengan *probability* $C^2 > 5\%$ menegaskan bahwa model terbebas dari masalah autokorelasi, data harus segera diperbaiki agar model tetap dapat digunakan. Untuk menghilangkan masalah autokorelasi, maka dilakukan estimasi dengan diferensi tingkat satu.

3.8.3. Deteksi Heteroskedastisitas

Deteksi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias tetapi tidak efisien. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *white heteroscedasticity standard errors and covariance* yang tersedia dalam program SPSS. Uji ini diterapkan pada hasil regresi yang menggunakan prosedur equation dan metode OLS untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu diperhatikan dalam uji ini adalah nilai F dan *Obs*Squared*, secara khusus adalah nilai probability dari *Obs*Squared*. Dengan uji *White* dibandingkan *Obs*Squared* dengan χ^2 (*chisquared*) tabel. Jika nilai *Obs*R-Squared* lebih kecil dari nilai χ^2 tabel maka tidak ada heteroskedastisitas pada model.

3.9. Pengujian Kriteria Statistik

Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada.

Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t), pengujian koefisien regresi secara bersama sama (Uji F), dan pengujian determinasi *Goodness of fit test* (R^2).

3.9.1. Uji Kebaikan Suai(R^2)

Menyatakan bahwa koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R^2 adalah antara 0

dan 1. Nilai R^2 yang kecil (mendekati 0) berarti kemampuan variabel variabel dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggambarkan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik.

